

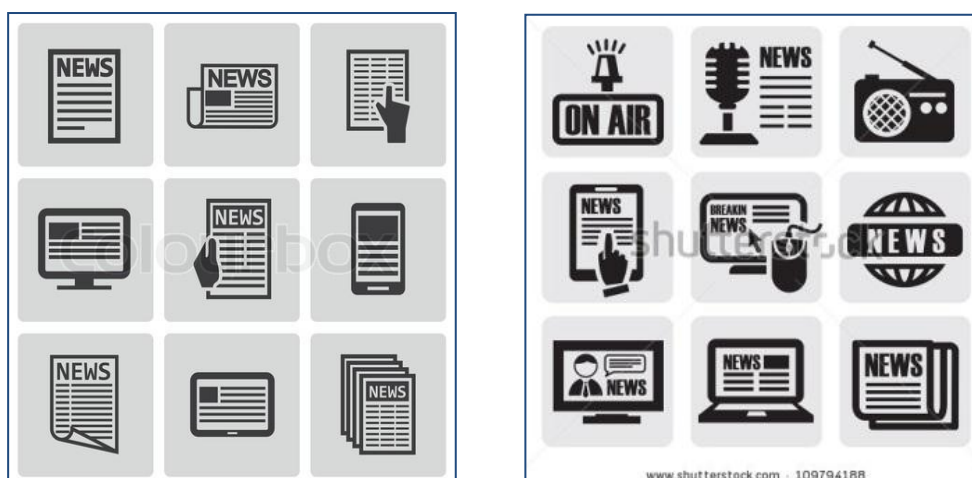


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Senin, 25 Agustus 2014



**Pusat Data Informasi dan Rencana Pembangunan Nasional
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. 25 PROYEK PRIORITAS DISERAHKAN KE PEMERINTAH BARU (*Media Online Indonesia Finance Today*)
2. PU BUTUH DANA TAMBAHAN Rp. 1 TRILIYUN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN TOL (*Media Online Indonesia Finance Today*)

25 PROYEK PRIORITAS DISERAHKAN KE PEMERINTAH BARU



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ifft.co.id

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499




INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Senin, 25 Agustus 2014Halaman 1, Kolom 1-7

25 Proyek Prioritas Diserahkan ke Pemerintah Baru

Presiden terpilih akan mengevaluasi 25 proyek tersebut karena ada beberapa proyek yang membutuhkan keputusan strategis dari presiden, khususnya pada proyek yang berbenturan dengan kepentingan negara.

Jalan Tol

- Jalan Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok
- Ekstensi ruas jalan tol DKI Jakarta
- Jalan Tol Palem-Panglima
- Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
- Jakarta Sewerage untuk mendukung NCKO

Jalur transportasi

- Jalan Raya Ciputat-Serpong-MSC
- Angkutan Massal Cepat (MRT & Transjakarta) Lebakua
- Angkutan Air Cepat (KMP) Jakarta-Sunda Kelapa
- Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta-Dava Selatan
- Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta-Karawang
- Jakarta-Holland
- Mass Rapid Transit (MRT) Jabodetabek
- Kawasan Strategis & Infrastruktur Selat Sunda

PLTU

- Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap 23000 MW di Jawa Tengah (P5)
- PLTU Indragiri dan PLU Agartika 1.200 MW
- SRM Lebakua

Regional Solid Waste Management for Mamminasata South Sulawesi

Pelabuhan

- Pelabuhan Kuala Tanjung
- Pelabuhan Cilamaya dan Jalan Muaranya
- Pelabuhan Bering
- Pelabuhan Malibu
- Pelabuhan Pontianak
- Port Sea Shipping
- National Capital Integrated Coastal Development

Presiden SBY. "Sebelumnya Pemerintah KIB II telah membuat 40 proyek strategis yang akan *groundbreaking* sebelum pemerintahan berakhir, tetapi waktu yang sempit dan masih belum ada kesiapan pembangunan, pemerintah hanya mengambil 15 proyek saja dan 25 proyek tersebut diserahkan ke presiden terpilih," katanya.

tersebut dinilai siap untuk bisa dikerjakan lebih cepat. Menurut Dedy, 25 proyek prioritas tersebut diserahkan kepada pemerintah baru karena sulit bisa dilaksanakan pada periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB II) karena belum siap. Dua puluh lima proyek tersebut sebenarnya merupakan bagian dari 40 proyek utama yang dicanangkan

dilanjutkan ke periode presiden terpilih Joko Widodo. Dedy S Priatna, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan proyek

Dedy mengungkapkan, presiden terpilih akan mengevaluasi 25 proyek tersebut karena ada beberapa proyek yang membutuhkan keputusan strategis dari presiden, khususnya pada proyek yang berbenturan dengan kepentingan negara.

Salah satu proyek yang membutuhkan keputusan presiden terpilih adalah proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat dan jalan akses dengan nilai investasi mencapai Rp 14,9 triliun. Proyek tersebut diakhiri ke pemerintah baru karena berbenturan dengan ladang minyak tengah laut yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java, anak usaha PT Pertamina (Persero).

"Salah satu proyek yang diakhiri dan butuh keputusan presiden terpilih adalah pelabuhan Cilamaya. Proyek tersebut jika ingin dilanjutkan membutuhkan Rp 2 triliun untuk konstruksi dan Rp 100 triliun untuk ganti rugi produksi. Sedangkan jika ada pelabuhan di tempat itu ada penertaman mencapai Rp 700 triliun," ujarnya.

Adapun 25 proyek yang diserahkan kepada pemerintahan baru antara lain jalan tol akses pelabuhan Tanjung Priok, enam ruas tol DKI Jakarta, Kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda, pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Cilamaya dan jalan aksesnya, serta angkutan massal cepat (MRT dan Transway) Surabaya.

Bambang Prihantoro, Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan, mengatakan salah satu dari 25 proyek tersebut sangat baik jika bisa dikerjakan lebih cepat adalah pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Trans Surabaya dari Wonokromo ke Tanjung Perak, Jawa Timur.

Perbaiki Regulasi

David Sumal, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), mengatakan presiden terpilih bisa saja mengerjakan proyek yang sudah disiapkan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung. Namun, untuk melanjutkan proyek tersebut tentu masih membutuhkan quick win agar bisa bergerak cepat yaitu perbaikan regulasi.

Menurut dia, saat ini regulasi yang buruk masih menghambat laju investasi sehingga perlu dipercepat untuk melakukan perbaikan. "Selain melanjutkan proyek yang sudah ada, presiden terpilih perlu pembentukan persepsi domestik dan internasional seperti quick win investasi," tegasnya. ●

Presiden terpilih akan mengevaluasi 25 proyek tersebut karena ada beberapa proyek yang membutuhkan keputusan strategis dari presiden, khususnya pada proyek yang berbenturan dengan kepentingan negara.

Hashtag Berita :
#Infrastruktur #RKP(RencanaKegiatanPemerintahan)

PU BUTUH DANA TAMBAHAN Rp. 1 TRILIYUN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN TOL



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & iOS
di : www.ift.co.id

Untuk berlangganan
koran Indonesia Finance Today
hubungi 021-700 95499



INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Senin, 25 Agustus 2014Halaman 20 Kolom 1-5

PU Butuh Dana Tambahan Rp 1 Triliun untuk Pembebasan Lahan Tol

Dana tambahan itu dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek jalan tol di berbagai daerah.

Akmal Hidayat, Teti Purwanti

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan dana tambahan selukitnya Rp 1 triliun untuk menuntaskan pembebasan lahan jalan tol di sejumlah wilayah hingga akhir 2014 yang mencapai Rp 2,6 triliun. Saat ini dana yang bersumber dari Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (APBN) 2014 tersedia sebesar Rp 1,6 triliun.

Subsago, Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU menjelaskan dana tambahan yang diusulkan dari lapangan lebih dari Rp 1 triliun, yaitu total Rp 2,6 triliun. Beberapa proyek tol yang masih membutuhkan dana pembebasan lahan antara lain ruas Solo-Mantingan, Mantingan-Kertosono, Pandaan-Malang, Sorong-Paer Kaja, dan Cusumdawa di Jawa. Selain itu tol di Sumatera, yakni ruas Medan-Kualanamu-Tebingtinggi dan Medan-Binjai.

"Dari hasil evaluasi, saat ini alokasi dana yang bersumber dari APBN sekitar Rp 1,6 triliun untuk pembebasan lahan tol, dan 75% lebih atau sekitar Rp 600 miliar sudah diserap," kata Subsago kepada IFT.

Menurut dia, pengalaman beberapa tahun terakhir dana pembebasan lahan tidak pernah habis, tetapi melihat progress penyerapan yang tinggi hingga Oktober, diprediksi tahun ini anggaran pembebasan lahan akan habis.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam nota kesanggupan dan RAPBN 2015 telah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian PU sebesar Rp 74,2 triliun. Presiden SBY mengatakan dengan adanya pengembangan infrastruktur sebagai faktor utama, maka diharapkan biaya logistik akan menurun dari 25,2% terhadap PDB pada 2013, menjadi 23,6% pada 2015.

Dyoko Kirmanto, Menteri PU mengatakan alokasi dana Rp 74,2 triliun terbagi menjadi empat kelompok besar, salah satunya un-



Pemerintah butuh dana tambahan untuk bebaskan lahan tol.

02014 PT/ANALIS/AG/001

tuk menunjang konektivitas termasuk pembangunan jalan tol. "Kalau bicara konektivitas di PU kaitannya dengan jalan, jadi meningkatkan jalan-jalan yang masih substandar, di luar Jawa itu banyak jalan nasional yang lebarnya hanya lima meter dan kita ingin ditingkatkan minimal menjadi tujuh meter. Ada sepanjang 2.300 kilometer jalan yang harus dilebarkan," kata dia.

Alokasi dana juga dipakai untuk membangun jalan tol yang memerlukan support pemerintah terutama untuk tol yang secara finansial tidak layak seperti tol Medan-Kualanamu, tol Cusumdawa (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), tol Menado-Bitung dan tol Kertosono-Solo.

"itu dilokasikan dari dana dalam rangka konektivitas, di samping juga preservasi jalan yang lebih dari 30 ribu kilometer yang harus tetap dijaga," kata Dyoko.

Kelompok selanjutnya adalah dana untuk ketahanan pangan dan ketahanan air. Saat ini, waduk yang sedang on-going ada 21 waduk dan 195 embung yang akan dibangun pada 2015. Kementerian PU juga akan membangun jaringan-jaringan irigasi baru seluas 33 ribu hektare, irigasi rawa 10 ribu dan air tanah di 65 titik.

Selanjutnya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, sampah dan lain-lain. Tahun depan akan dibangun drainase di 53 kota di seluruh Indonesia, manajemen sampah di 41 kota/kabupaten, kemudian ada Sistem Pembangunan Air Minum (SPAM) regional di 6 kawasan, lalu SPAM di Bukota Kecamatan (HK) di 159 HK. SPAM pedesaan, serta pembangunan infrastruktur air minum di 1.700 desa.

Terakhir, alokasi dana disiapkan untuk menghindari daya rusak air, seperti pengendalian banjir Ciliwung yang terjadi setiap tahun. Kerusakan aliran sungai akan diperbaiki, dimana terdapat sepanjang 125-140 kilometer tanggul-tanggul sungai seperti di Ciliwung, Bengawan Solo, dan Pesanggrahan yang rusak.

"Anggaran ini termasuk untuk penguatan pantai seperti yang diamanahkan Presiden SBY. Untuk pemeliharaan pantai itu ada 22,5 kilometer," kata Menteri PU.

Penyerapan Anggaran

Adapun rata-rata pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur PU dan permukiman per akhir Juli 2014 telah mencapai hampir 100%, bahkan ada yang sudah melampaui 100% target sasaran RPJMN.

Penyerapan APBN 2014 Kementerian PU sampai dengan 15 Agustus 2014 baru mencapai Rp 31,75 triliun (42,68% dari total Rp 75,46 triliun) dengan fisik 47,03%. Kementerian akan melakukan percepatan penyerapan anggaran dan penyelesaian seluruh fisik proyek dalam sisa waktu hingga 20 Oktober 2014. ●

Kementerian pekerjaan umum membutuhkan dana tambahan untuk menentukan pembebasan lahan jalan tol di sejumlah wilayah hingga akhir 2014.

Hashtag Berita :

#Infrastruktur #RPJMN(RencanaProgramJangkaMenengahNasional) #APBNPerubahan2014